

# PENERIMAAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN PENDAPATAN PERKAPITA DAERAH SEBELUM DAN SETELAH DESENTRALISASI FISKAL

**Eleonora Sofilda**

Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi  
Universitas Trisakti

**ABSTRACT** : Fiscal decentralization is expected to increase the efficiency and effectiveness of governance and public service area, which will further encourage the local economy and improving people's welfare. The successful of implementation of economic development can be assessed from several indicators. One indicator that is often used is economic growth. While, some factors that influence economic growth among other is the rate of consumption, investment, labor, and government spending and trade areas. This research adopts a production function base estimation framework. The empirical estimation is done on a sample of panel data that comprises of 26 state governments and the same time yearly data 1992 to 2009. This research uses 2 estimation models and uses the common pooled last square. The estimation result of model I and II (as representation of revenue indicators), show a negative relationship with per-capita income growth and insignificant. But revenue minus grant (Model II) has positive relationship with the per-capita income growth and insignificant for the variable FDI and DDI, also give which is positive relationship but statistically insignificant. For import and labor force variable, they are also incompatible with the hypothesis and have no significant effect. For inflation and population variables, they are in accordance with the hypothesis and have a significant effect on per-capita income growth. Meanwhile, for unemployment variable, it is in accordance with the hypothesis but also statistically has no significant effect. In simultaneously, fiscal decentralization policy (for the whole models) has a significant effect on per- capita income growth, which is as representation of economics growth variable.

**Key words** : fiscal decentralization, per-capita income growth, revenue, economics growth, FDI, DDI, labor, inflation, and unemployment

**ABSTRAK** : Desentralisasi fiskal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik daerah, yang selanjutnya akan mendorong ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu indikator yang sering digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Sementara, beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain adalah tingkat konsumsi, investasi, tenaga kerja, dan belanja pemerintah dan daerah perdagangan. Penelitian ini mengadopsi fungsi kerangka estimasi basis produksi. Estimasi empiris dilakukan pada sampel data panel yang terdiri dari 26 pemerintah negara bagian dan saat yang sama data yang tahunan 1992-2009. Penelitian ini menggunakan 2 model estimasi dan menggunakan penggabungan yang terakhir. Hasil estimasi model I dan II (sebagai representasi indikator pendapatan), menunjukkan hubungan negatif dengan pertumbuhan pendapatan per kapita dan tidak signifikan. Tapi pendapatan dikurangi hibah (Model II) memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan pendapatan per kapita dan tidak signifikan untuk FDI variabel dan DDI, juga memberikan yang hubungan positif tetapi secara statistik tidak signifikan. Untuk impor dan variabel angkatan kerja, mereka juga tidak sesuai dengan hipotesis dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Untuk inflasi dan populasi variabel, mereka sesuai dengan hipotesis dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita. Sementara itu, untuk variabel pengangguran, hal ini sesuai dengan hipotesis tetapi juga statistik tidak berpengaruh signifikan. Dalam bersamaan, kebijakan desentralisasi fiskal (untuk seluruh model) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita, yaitu sebagai representasi dari variabel pertumbuhan ekonomi.

**Kata kunci:** Desentralisasi fiskal, pertumbuhan pendapatan per kapita, pendapatan, pertumbuhan ekonomi, FDI, DDI, tenaga kerja, inflasi, dan pengangguran

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan utama kebijakan reformasi ekonomi (kebijakan desentralisasi fiskal) adalah meningkatkan standar hidup melalui pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator. Salah satu indikator yang sampai saat ini digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah tingkat konsumsi, investasi, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah, serta kegiatan perdagangan. Kebijakan yang ditempuh oleh negara-negara di dunia baik negara maju dan berkembang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah kebijakan desentralisasi fiskal di mana salah satu tujuan desentralisasi fiskal adalah kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*) dalam kegiatan ekonomi makro.

Desentralisasi fiskal merupakan proses dimana pemerintah daerah diberikan wewenang atas kegiatan ekonomi di suatu daerah dan merupakan salah satu kebijakan transfer sumberdaya yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam penyediaan barang public dan pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian/kajian empiric menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki kontribusi yang potensial terhadap pertumbuhan ekonomi, antara lain penelitian dari Samimi (2010), Pose and Ezcurra (2010), Carrion et al (2008), Filter-Stein & Iwata (2005), Iimi (2004), Hamzah (2004), Lin dan Liu (2000), Phillips and Woller (1997), Zhang and Zou (1998), dan Oates (1995). Samimi (2010) menemukan hubungan yang positif antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Iran dengan tahun penelitian 2001 sampai dengan 2007. Oates (1995) juga menemukan hal yang sama. Phillips dan Woller (1997) menemukan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju tetapi tidak untuk negara-negara berkembang. Lin dan Liu (2000) juga menemukan bahwa desentralisasi fiskal telah membuat kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Cina. Sementara itu Hamzah (2004) dengan mengadopsi fungsi produksi Cobb-Douglas dengan menggunakan data panel yang terdiri dari 26 pemerintah negara bagian dan data time series tahunan 1992-2002, menunjukkan bahwa variabel desentralisasi fiskal (indikator pengeluaran) menunjukkan koefisien negatif dan tidak signifikan. Sementara, indikator pendapatan menunjukkan koefisien negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Di Indonesia gagasan desentralisasi telah diterapkan terutama sejak kebijakan otonomi daerah dibuat pada awal tahun 2001 berdasarkan UU no 22 dan 25 tahun 1999 yang maksimum power / wewenang kepada pemerintah daerah. UU ini diperbarui dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, ada juga UU 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang mengatur hal-hal mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam membuat koleksi untuk masyarakat lokal untuk mendapatkan putaran sumber pendanaan untuk pembangunan daerah dan hukum ini berlaku dari 1 Januari 2010. Pokok dan undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah yang disebutkan di atas, pada dasarnya dihubungkan dengan prinsip dasar yang sering disebut sebagai uang mengikuti fungsi (*money follow function*). Oleh karena itu, dalam kerangka desentralisasi fiskal, instrumen utama yang memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk memungut pajak (*taxing power*) dan transfer ke daerah.

Seperti kita ketahui hampir semua otoritas pemerintah pusat diserahkan daerah, kecuali lima bidang: Kebijakan Pertahanan, Luar Negeri dan Keamanan, Keadilan, Moneter dan Fiskal, dan Agama. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari anggaran negara sehubungan dengan kebijakan keuangan negara adalah untuk mencapai kesinambungan fiskal dan memberikan stimulus bagi kegiatan ekonomi masyarakat, maka kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan dapat menciptakan antar-daerah distribusi kemampuan keuangan sepadan dengan ukuran kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom. Itulah mengapa dalam penelitian ini, penulis ingin melihat apakah variabel dalam makro-ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia sejak Januari 2001, mempertimbangkan

pada awal fase baru pemerintahan, di mana otonomi daerah diterapkan di semua kedua tingkat (kota dan kabupaten) yang jumlah saat ini mencapai 497 kota / kabupaten.

Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada studi antara / antara negara-negara, sedangkan penelitian ini berfokus pada studi tentang aspek lokal. Studi lokal adalah penting karena berkorelasi dengan: (i) perencanaan pembangunan daerah, (ii) efisiensi; seperti mencakup penciptaan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan lokal, termasuk kemajuan pelayanan publik, dan (iii) penciptaan demokratisasi proses dan penciptaan akuntabilitas publik di tingkat lokal (Hamzah, 2011).

Desentralisasi fiskal menyebabkan pemerintah daerah perlu mencari cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka. dan harus mencari sumber daya untuk mendukung ekonomi lokal mereka. Ada beberapa cara di mana pemerintah daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam komunitas lokal mereka. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan untuk menyediakan pelayanan publik, masyarakat setempat membutuhkan dana. Pemerintah daerah mungkin harus meningkatkan pajak untuk mendanai kegiatan ekonominya. Kelemahan dari perpajakan adalah bahwa hal itu akhirnya dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana disebutkan di atas, pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia di tingkat II (Kabupaten / Kota). Karena data yang lengkap pada variabel ekonomi makro, studi ini hanya menggunakan data provinsi yang terdiri dari 26 provinsi, dari 33 provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data time series tahunan 26 propinsi 1992-2009.

## **2. LANDASAN TEORITIS**

### **2.1. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi di suatu negara sangat bergantung pada sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, bisnis, teknologi, dan sebagainya. Semua itu dikenal sebagai faktor penentu kegiatan ekonomi. Namun pertumbuhan ekonomi tidak bisa terjadi selama lembaga-lembaga sosial dan budaya, kondisi politik dan keamanan, serta nilai-nilai moral dalam sebuah negara tidak mendukung. Dengan kata lain tanpa dukungan faktor non-ekonomi seperti baik, maka pertumbuhan ekonomi tidak dapat terwujud.

Sebenarnya perhitungan laju pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara banyak cara, tergantung pada bagaimana model pertumbuhan yang digunakan. Diantara beberapa teori pertumbuhan, pertumbuhan Model Harrod-Domar membahas investasi dalam proses pertumbuhan ekonomi, terutama pada sifat multiplier dari investasi yang dimiliki. Pertama, menciptakan penghasilan investasi (dampak dari permintaan investasi), dan kedua, ekonomi investasi dengan memperluas kapasitas produksi bagaimana meningkatkan modal saham (dampak dari penawaran investasi). Oleh karena itu, selama bersih investasi tersedia dan masih dalam proses, pendapatan riil dan output akan terus meningkat. Namun, untuk menjaga tingkat pendapatan ekuilibrium pada kapasitas kesempatan kerja penuh, baik pendapatan riil dan output keduanya harus dalam kecepatan yang sama pada saat kapasitas produktif modal meningkat. Jika tidak, perbedaan di antara mereka akan menyebabkan kelebihan kapasitas atau ada kapasitas menganggur (*idle capacity*). Hal ini memaksa pemilik modal untuk membatasi pengeluaran investasi yang pada akhirnya membawa dampak buruk bagi ekonomi: pendapatan lebih rendah dan kesempatan kerja pada periode berikutnya, dan menggeser pertumbuhan stabil ekonomi keluar jalur. Jadi jika pekerjaan akan dipertahankan dalam jangka panjang, investasi harus selalu membesar. Ini jelas memerlukan pertumbuhan pendapatan riil konstan pada tingkat yang cukup untuk memastikan pemanfaatan kapasitas penuh dari modal saham yang terus berkembang. Tingkat diperlukan pertumbuhan pendapatan ini disebut tingkat dijamin pertumbuhan (Jhingan, 1993). Harrod Domar-model yang dibangun berdasarkan asumsi-asumsi: (i) perekonomian dalam kondisi kerja penuh dan perekonomian tertutup, (ii) tidak ada gangguan pemerintah, (iii) Kecenderungan Marjinal Menyimpan (MPS) mengacu kepada peningkatan tabungan (non -membeli arus barang dan jasa)

yang dihasilkan dari peningkatan pendapatan bersama dengan kecenderungan rata-rata untuk menyelamatkan (APS), juga dikenal sebagai rasio tabungan. dimana MPS dianggap konstan, (iv) rasio modal saham terhadap pendapatan dianggap tetap, (v) tidak ada penyusutan barang modal, (vi) tingkat harga umum adalah konstan (upah riil sama dengan pendapatan riil), (vii) tidak ada perubahan tingkat suku bunga.

Menurut Domar, sisi penawaran agregat ditunjukkan melalui sejumlah kenaikan bersih potensial dalam output ekonomi yang dirumuskan sebagai berikut:

$$dY = Iv \dots\dots\dots [1]$$

Dimana  $dY$  adalah peningkatan output,  $I$  adalah investasi, dan  $v$  adalah rasio modal-output. Seperti kita ketahui bahwa investasi merupakan salah satu faktor penentu permintaan agregat, dan juga telah memahami bahwa hubungan antara permintaan agregat dan output dapat dijelaskan melalui multiplier. Kita bisa menulis lagi bahwa dalam keseimbangan pasar barang:

$$Y = C + S \dots\dots\dots [2]$$

Oleh karena itu,  $I = S$  dan  $C = cY$  kemudian,

$$Y = cY + I \dots\dots\dots [3]$$

$$Y - cY = I \dots\dots\dots [4]$$

$$(1 - c)Y = I \dots\dots\dots [5]$$

Sementara itu, Pertumbuhan Teori Klasik dan Neoklasik dirumuskan sebagai berikut:

$$sY = I \dots\dots\dots [6]$$

$$Y = (1/s)I \dots\dots\dots [7]$$

Dimana  $Y$  adalah pendapatan nasional,  $I$  adalah investasi,  $s$  adalah kecenderungan marjinal untuk menabung, atau MPS, dan  $1/s$  multiplier. Untuk menunjukkan perubahan keberadaan, persamaan [6] menjadi:

$$dY = (1/s)dI \dots\dots\dots [8]$$

Menurut Domar untuk mencapai pertumbuhan kondisi mapan, permintaan agregat harus tumbuh dalam kecepatan yang sama dengan pertumbuhan kapasitas produksi. Dengan demikian dari persamaan [1] dan [8] diperoleh:

$$Iv = (1/s)dI \dots\dots\dots [9]$$

$$dI/I = sv \dots\dots\dots [10]$$

$$I/Y = (I/K)(K/Y) = gv \dots\dots\dots [11]$$

Dari persamaan [6] dapat diperoleh:  $I / Y = s$ , sehingga persamaan [11] menjadi,  $s = gv \dots\dots\dots [12]$

Atau,

$$g = s/v \dots\dots\dots [13]$$

dimana " $s/v$ " adalah tingkat pertumbuhan dijamin (tingkat pertumbuhan dijamin). Sekarang ini adalah model dasar dari Harrod. Harrod Domar-model asli mengasumsikan bahwa  $s$  dan  $v$  adalah konstan, yang sangat ditentukan oleh struktur kelembagaan.

## 2.2. Fungsi Produksi Cobb-Douglas

Dalam studi ini mengadopsi kerangka estimasi produksi-fungsi berbasis seperti yang diusulkan oleh Lin dan Liu, 2000 (lihat Hamzah, 2004) untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Studi ini mengasumsikan fungsi produksi Cobb-Douglas, sehingga produksi pada waktu  $t$  dapat digambarkan sebagai :

$$Y(t) = K(t)A(t)^\alpha \psi^{1-\alpha} \tag{1}$$

Dimana  $Y$  menyatakan output per kapita,  $K$  modal per kapita,  $A$  tingkat teknologi (diasumsikan konstan), fraksi dari populasi dan angkatan kerja dan  $0 < \alpha < 1$ . Kita dapat mengekspresikan persamaan (2,1) dalam bentuk log dan mengambil diferensiasi urutan pertama dengan terhadap

waktu dan kami menemukan bahwa tingkat pertumbuhan output per kapita dapat ditulis sebagai: ( 2 )

$$g(t) = y(t) = \hat{K}(t) + \alpha \hat{A}(t)$$

Dalam persamaan (2,2), tingkat pertumbuhan output per kapita tergantung pada dua faktor: tingkat pertumbuhan modal per kapita dan tingkat kemajuan teknologi. Perlu dicatat bahwa istilah mencerminkan bukan hanya teknologi tetapi juga perbedaan dalam anugerah sumber daya dan lembaga di seluruh provinsi dan dari waktu ke waktu, serta dalam karakteristik diamati lain provinsi-spesifik. Dalam studi ini, kita berasumsi bahwa tergantung pada satu set variabel. Kita mulai dari, sama dengan investasi (INV), yang terdiri dari investasi dalam negeri (DDI) dan pengeluaran pemerintah investasi (Gov-Inv). Kedua variabel dibiayai oleh tabungan dari sektor swasta (Sp) dan pemerintah (Id), dan karenanya, identitas tabungan-investasi dapat ditulis sebagai:

$$S_p + S_g = DDI + GovInv \quad ( 3 )$$

Namun, jika tabungan dikurangi investasi domestik dan pengeluaran investasi pemerintah negatif, maka kita dapat menggunakan investasi asing (FDI) untuk membiayai defisit atau:

$$(S_p + S_g) - (DDI + GovInv) = FDI \quad ( 4 )$$

Oleh karena itu, persamaan (2) dapat ditulis ulang sebagai berikut:

$$y_{it} = \beta_1 DDI_{it} + \beta_2 FDI_{it} + \beta_3 GovInv_{it} + \beta_4 K_{it} + \varepsilon_i \quad ( 5 )$$

Di mana menunjukkan provinsi, t menandakan waktu, adalah tingkat pertumbuhan per kapita GDP dan efek individu teramati. GovInv sebagai proxy untuk pengukuran desentralisasi fiskal (FD). Oleh karena itu, persamaan (2.5) dapat ditulis ulang sebagai berikut:

$$y_{it} = \beta_1 FD_{it} + \beta_2 DDI_{it} + \beta_3 FDI_{it} + \beta_4 K_{it} + \varepsilon_i \quad (6)$$

### 2.3. Sumber-Sumber Penerimaan Daerah

Otonomi Daerah dengan sendirinya berarti bahwa daerah tersebut harus membiayai sendiri kegiatannya baik dari sumber-sumber pendapatan asli daerah ataupun dari dana perimbangan. Dana perimbangan ini nantinya akan diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN adalah suatu rencana keuangan tahunan negara yang ditetapkan berdasarkan UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Hamzah, 2008).

Dalam rangka Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah harus mencari sendiri sumber-sumber keuangannya. Dalam Bab III pasal 3 bagian pertama UU No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah/desentralisasi adalah bersumber dari : (i). Pendapatan Asli Daerah (PAD), (ii). Dana Perimbangan, (iii). Pinjaman Daerah, (iv). Lain-lain pendapatan yang sah.

Sumber-sumber PAD pada bagian kedua Bab III pasal 4 undang-undang tersebut disebutkan terdiri dari : (i). Pendapatan pajak daerah, (ii). Pendapatan retribusi daerah, (iii). Pendapatan perusahaan milik daerah dan pendapatan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan (iv). Lain-lain PAD yang sah (antara lain pendapatan penjualan aset daerah dan jasa giro). PAD adalah hal utama yang mempengaruhi pelaksanaan perencanaan kebijakan Otonomi Daerah. Dengan diberlakukannya perencanaan kebijakan Otonomi Daerah, otomatis bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Daerah akan berkurangan. Sementara seperti diketahui kekayaan sumber alam dan retribusi yang dipendapatankan oleh masing-masing Daerah tidak sama.

Dana perimbangan menurut UU No.25 tahun 1999 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan merupakan sumber pembiayaan yang berasal dari bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan pendapatan dari sumber alam ( meliputi pertambangan umum, pertambangan minyak dan gas alam, kehutanan, dan perikanan), serta Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sementara DAK bertujuan untuk membantu membiayai keperluan-keperluan khusus Daerah dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Desain Penelitian dan Variabel Pengukuran

Penelitian ini akan menguji hipotesis dan menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 1992 hingga 2009, dengan menggunakan data sekunder dan menggunakan regresi multivariat sebagai alat analisis. Penelitian ini menggunakan hipotesis terarah, tes hubungan tetapi dapat menunjukkan arah hubungan, baik positif atau negatif. Unit analisis yang terdiri dari 26 provinsi di Indonesia dilakukan untuk sampel data cross section (dari 33 provinsi) dan data time series tahunan 1992-2009, maka kita akan menggunakan data panel dalam penelitian ini. Tujuh lainnya Provinsi (Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Timur Papua) dibentuk setelah undang-undang otonomi daerah diundangkan pada tahun 2001. Penjelasan rinci about variabel (dependant dan independen), indikator dan hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1. Deskripsi variabel**

Variabel: Dependen dan Independen	Indikator	Hipotesis
Dependen Var : Y	Pertumbuhan dari income perkapita	
Pendapatan	Rasio total pendapatan daerah thd total penerimaan pemerintah	Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan
Pendapatan - Bantuan	Rasio total pendapatan daerah grant thd total penerimaan pemerintah	Pendapatan – Bantuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan
FDI (Investasi Asing)	Rasio investasi asing Daerah thd PDRB	FDI berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan
4. DDI (Investasi Domestik)	Rasio investasi domestic Daerah thd PDRB	DDI berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan
5. Impor	Rasio impor atas PDRB.	Impor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan
6. Ekspor	Rasio ekspor atas PDRB.	Ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan
7. Inflasi	Inflasi	Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan
8. LF (Angkatan Kerja)	Pertumbuhan angkatan kerja	Angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan
9. POP (Penduduk)	Pertumbuhan penduduk	Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan
10. Unemp (Pengangguran)	Pengangguran	Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan

#### 3.2. Metode Analisis : Panel data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi dengan menggunakan panel data, yaitu suatu model yang menyatukan antara data deret waktu (*time series*) dan data kerat lintang (*cross section*) menghasilkan data yang disebut *pooled data* atau data panel atau *longitudinal data*. Dalam analisa model data panel terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk mengestimasi parameter yaitu model kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square*), model efek tetap (*Fixed Effect*

Model), dan model efekacak (*Random Effect Model*). Penelitian ini menggunakan dua model, yaitu pendapatan dengan pendapatan setelah dikurangi dengan bantuan (grant) sebagai variabel utama dengan tahun penelitian 1992-2009 dan 26 Propinsi.

#### Model I

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 \text{PendTotal}_{it} + \beta_2 \text{FDI}_{it} + \beta_3 \text{DDI}_{it} + \beta_4 \text{IMPORT}_{it} + \beta_5 \text{EXPORT}_{it} + \beta_6 \text{INF}_{it} + \beta_7 \text{LF}_{it} + \beta_8 \text{POP}_{it} + \beta_9 \text{UNEMP} + \beta_{10} \text{Dummy}_{it} + \varepsilon$$

#### Model II

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 \text{Penda-grant}_{it} + \beta_2 \text{FDI}_{it} + \beta_3 \text{DDI}_{it} + \beta_4 \text{IMPORT}_{it} + \beta_5 \text{EXPORT}_{it} + \beta_6 \text{INF}_{it} + \beta_7 \text{LF}_{it} + \beta_8 \text{POP}_{it} + \beta_9 \text{UNEMP} + \beta_{10} \text{Dummy}_{it} + \varepsilon$$

## 4. DESKRIPSI DAN ANALISA HASIL

### 4.1. Pertumbuhan dan Penerimaan Daerah

Sesuai dengan perkembangan kabupaten / kota, realisasi total pendapatan di seluruh provinsi pada tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar 35,1 persen dari tahun 2007, yang peningkatan terbesar disumbangkan oleh Saldo Dana sebesar 53,3 persen. Sementara itu, wilayah lain pendapatan mengalami penurunan sebesar 1,7 persen (lihat tabel 4.2.).

**Tabel 2. Realisasi Penerimaan Daerah  
Tahun 2007 dan 2008 (Miliar Rp)**

PendapatanGrup	2007	2008	Perubahan (%)
PAD	35.177,1	44.515,5	21,0
Dana Perimbangan	22.196,6476	47.553,7533	53,3
Pendapatan Lain-lain	4737,0	4.658,2	-1,7
<b>Total</b>	<b>64.117,7</b>	<b>98.735,3351</b>	<b>35,1</b>

Sumber: Departemen Keuangan

Berbeda halnya dengan realisasi pendapatan provinsi, kelompok pendapatan semua kabupaten dan kota telah meningkat. Peningkatan realisasi pendapatan dan kabupaten kota sebesar 25,2 persen pada tahun 2008 (lihat tabel 4.3).

**Tabel 3. Realisasi Pendapatan Kabupaten dan Kota  
Tahun 2007 dan 2008 (miliar rupiah)**

PendapatanGrup	2007	2008	Perubahan(%)
PAD	16.727,3	20.230,4	20,9
Dana Perimbangan	196.284,3	246.688,4	25,7
Pendapatan Lain-lain	10.439,0	12.788,1	22,5
<b>Total</b>	<b>223.450,6</b>	<b>279.706,9</b>	<b>25,2</b>

Sumber: Departemen Keuangan

### 4.2. Pertumbuhan Pendapatan daerah dan Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita Setelah Otonomi Daerah

Pendapatan suatu daerah dapat didefinisikan sebagai jumlah pendapatan yang berasal dari daerah dari pajak dan bukan pajak retribusi, serta melakukan bangsa atau hibah dan pinjaman. Pendapatan pemerintah daerah adalah salah satu faktor utama untuk pembiayaan pembangunan. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah memiliki tujuan untuk memberdayakan kemampuan lokal dan memberikan kesempatan bagi setiap daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya. Peningkatan dan pertumbuhan perekonomian daerah akan membawa dampak yang signifikan pada peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut. Sebelum pelaksanaan otonomi regional, regional atau provinsi di datang berasal dari pendapatan (PAD). Setelah berlakunya kebijakan tersebut, selama periode 2001-2009 tidak berubah secara fundamental, hal ini karena provinsi yang mencakup sepuluh besar adalah sama dengan periode sebelum desentralisasi,

hanya saja kembali ada pergeseran posisi, selain itu setelah era otonomi daerah provinsi dalam pergeseran ke sepuluh provinsi teratas dalam hal penerimaan tamu dari Bali. Kesimpulan yang dapat diambil adalah provinsi yang memiliki pengeluaran pemerintah yang besar diikuti oleh pendapatan pemerintah yang besar juga.

### 4.3. Hasil Pengujian Secara Statistik

#### 4.3.1. Multikolinieritas, Heterokedastisitas, dan Autokorelasi

Multikolinieritas berarti bahwa ada hubungan yang signifikan antara dua variabel independen atau variabel yang lebih independen dalam model regresi. Berdasarkan hasil pengujian secara statistik diperoleh hasil Jika  $F < F_{tabel}$  berarti  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak (tidak ada multikolinieritas). Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas dalam penelitian ini, penulis melakukan tes dengan metode ARCH, dimana jika pentingnya  $Prob * R^2 > 0,05$  maka model tidak mengandung heteroskedastisitas, dan sebaliknya. Pengolahan hasil tes seperti yang ditunjukkan pada tabel 4. di bawah ini:

**Tabel 4. Uji heteroskedastisitas**

Model	Obs *R-squared	Probabilita	Kesimpulan
I	0.066776	0.7961	Horeceived
II	0.060233	0.8061	Horeceived

Tabel 4 di atas menunjukkan semua model informasi memiliki nilai  $Prob * R^2 > 0,05$  berarti hipotesis nol diterima. Disimpulkan dalam studi ini tidak ada heteroskedastisitas. Autokorelasi adalah suatu kondisi di mana kesalahan pengganggu periode tertentu ( $\mu$ ) berkorelasi dengan periode sebelumnya ( $\mu_{t-1}$ ). Pada kondisi gangguan kesalahan ini tidak gratis tetapi terkait satu sama lain. Dalam studi ini, untuk mendeteksi autokorelasi kita menggunakan uji LM. Ada beberapa kriteria atau dasar pengambilan keputusan untuk menyatakan bahwa ada autokorelasi model atau tidak, yaitu:

Jika  $R^2(t-1) > X$  atau probabilitas  $R(t-1) < 0,05$  maka ada autokorelasi

$R^2(t-1) < X$ , atau  $R$  probabilitas  $(t-1) > 0,05$  maka tidak ada autokorelasi Hasil pengolahan data dengan Eviews ditunjukkan oleh tabel di bawah ini.

**Tabel 5. Uji autokorelasi**

Model	Obs *R-squared	Probabilita	Kesimpulan
I	1.936579	0.164040	Horeceived
II	2.377815	0.123070	Horeceived

Berdasarkan uji kointegrasi tabel di atas pada residual model regresi menunjukkan Augmented Dickey Fuller metode (ADF), 0000 lebih kecil dari kemungkinan alpha 0,01 (alpha 1%), ini menunjukkan bahwa residu yang dihasilkan oleh persamaan stasioner pada tingkat (derajat 0) dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

#### 4.3.2. Hasil Pengujian Model dan Analisa Pembahasan

Dengan menggunakan data yang tersedia estimasi dilakukan dengan menggunakan data panel pada dua model yang ada dalam penelitian ini.

Model I dalam penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh dari total pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan data panel, maka ada tiga metode yang digunakan untuk menggambarkan model. Tabel 7 menunjukkan hasil model I dengan ketiga metode.

Tabel 7.  
Estimasi Hasil Model I

Variabel	Teori	Common Effect		Fixed Effect		Random Effect	
		Coeff		Coeff		Coeff	
Kontanta		9,860667	***	13,67587	***	13,73633	***
PENDAPATAN	+	-5,915914		-1,246677		-126,6535	*
FDI	+	0,023243		0,047208		0,030364	
DDI	+	0,039743		-0,014020		0,020203	
IMPOR	-	0,223609		-0,342253		0,360070	
EKSPOR	+	-0,287096		-0,286186		-0,949997	**
INFLASI	-	-0,209600	***	-0,294720	***	-0,282347	***
POPULASI	-	-0,800706	***	-0,796685	***	-0,713162	***
TENAGA KERJA	+	-0,014564		-0,092360	**	-0,116531	**
PENGANGGURAN	-	-0,005914		-0,012794		-0,012334	
DUMMY	+	-4,967648	***	-6,066283	***	-5,845061	***
R <sup>2</sup>		0,230411		0,225057		0,120381	
Adjusted R <sup>2</sup>		0,213571		0,162273		0,101134	
F-Statistik		13,68237	***	3,584590	***	6,254335	***

Sumber: Pusat statistik Biro & Bank Indonesia (data diolah Eviews 7.0)

Info: \* Signifikan pada alpha 10%

\*\* Signifikan pada alpha 5%

\*\*\* Signifikan pada alpha 1%

Uji Chow Berdasarkan hasil uji chi-square diperoleh nilai probabilitas  $0,9445 > 0,05$  sehingga hipotesis nol diterima, sehingga menyimpulkan metode yang digunakan untuk model III Kuadrat Terkecil Umum Pemusatan (PLS) dan pengujian berikutnya dari uji Hausman dilakukan untuk menguji antara FE dan RE tidak perlu terus menerus.

Tabel 8  
Uji Chow Model III (PLS vs FE)

Model	Cross-section Chi-Square	Chi-Sqd.f.	Prob.
III	14,866283	25	0,9445

Sumber: Data Olahan Eviews 7.0

Maka dengan berdasarkan hasil common PLS Untuk melihat apakah model tersebut cukup baik untuk menggunakannya atau tidak, untuk itu kita dapat melihat dari nilai R<sup>2</sup> Disesuaikan. Dari hasil estimasi diperoleh Adjusted R-squared nilai 0.213571, atau 21,35%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi dari semua variabel independen dalam menjelaskan perilaku pertumbuhan pendapatan per kapita di Indonesia selama periode 1992-2009 sebesar 21,35% sedangkan 78,65% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang kita tidak masuk ke dalam model.

F-stat nilai yang menggambarkan akurasi uji model adalah sebesar 13,68237, dengan probabilitas F-stat untuk 0000, dapat disimpulkan pada tingkat kepercayaan 99%, variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil uji individu (uji t) perhitungan pendapatan memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk FDI variabel dan DDI sesuai dengan teori memiliki hubungan positif tetapi tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk variabel Impor dan Ekspor juga tidak sesuai dengan hipotesis dan tidak memiliki efek signifikan, pada model I dan II ekspor masih memiliki efek yang signifikan. Untuk inflasi dan variabel populasi sesuai dengan hipotesis dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Untuk angkatan kerja tidak sesuai dengan hipotesis tetapi pengangguran sesuai dengan hipotesis tetapi tidak memiliki pengaruh signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan Otonomi Daerah sebagai dummy variabel tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita di Indonesia.

Model II dalam penelitian ini ingin melihat bagaimana mereka mempengaruhi pendapatan daerah setelah dikurangi bantuan pusat pertumbuhan pendapatan per kapita di 26 propinsi sampel. Dengan menggunakan data panel, maka ada tiga metode yang digunakan untuk menggambarkan model. Tabel 9 menunjukkan hasil model II dengan ketiga metode.

**Tabel 9.**  
**Estimasi Hasil Model II**

Variabel	Teori	Common Effect		Fixed Effect		Random Effect	
		Coeff		Coeff		Coeff	
Konstanta		9,551544	***	12,97015	**	13,17433	**
PENDAPATAN - GRANT	+	44,68728		-122,7223		-184,4446	
FDI	+	0,021818		0,064217		0,032393	
DDI	+	0,043821		-0,018397		0,029283	
IMPOR	-	0,212765		-0,117293		0,347354	
EKSPOR	+	-0,315618	*	-0,366297		-0,925850	**
INFLASI	-	-0,201976	***	-0,304181	**	-0,284553	**
POPULASI	-	-0,795321	***	-0,806273	**	-0,711883	**
TENAGA KERJA	+	-0,015313		-0,090802	*	-0,115100	**
PENGANGGURAN	-	-0,005540		-0,014025		-0,012093	
DUMMY	+	-5,019669	***	-5,918599	**	-5,641828	**
<b>R<sup>2</sup></b>		<b>0,226018</b>		<b>0,221002</b>		<b>0,117425</b>	
<b>Adjusted R<sup>2</sup></b>		<b>0,209082</b>		<b>0,157888</b>		<b>0,098113</b>	
<b>F-Statistik</b>		<b>13,34531</b>	<b>***</b>	<b>3,501668</b>	<b>***</b>	<b>6,080296</b>	<b>**</b>

Sumber: Pusat statistik Biro & Bank Indonesia (data diolah Eviews 7,0)

Info: \* Signifikan pada alpha 10%

\*\* Signifikan pada alpha 5%

\*\*\* Signifikan pada alpha 1%

Tabel 10. menunjukkan hasil tes untuk model II Chow Test, chi-kuadrat nilai probabilitas  $0,9368 > 0,05$  sehingga hipotesis nol diterima sehingga disimpulkan untuk model II digunakan metode Kuadrat Terkecil Umum Pemusatan (PLS) dan pengujian lebih lanjut dilakukan Uji Hausman untuk menguji antara FE dan RE tidak perlu dilanjutkan

**Tabel 10**  
**Uji Chow Model IV (PLS vs FE)**

Model	Cross-section Chi-Square	Chi-Sqd.f.	Prob.
IV	15,190935	25	0,9368

Sumber: Data Otahan Eviews 7.0

Untuk melihat apakah model tersebut cukup baik untuk menggunakannya atau tidak, untuk itu kita dapat melihat dari nilai  $R^2$  Disesuaikan. Dari estimasi yang didapat Adjusted  $R^2$  nilai 0,209082, atau 20,90%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi dari semua variabel independen dalam menjelaskan perilaku pertumbuhan pendapatan per kapita di Indonesia selama periode 1992-2009 sebesar 20,90% sedangkan 79,10% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang kita tidak masuk ke dalam model.

F-stat nilai yang menggambarkan akurasi uji model adalah sebesar 13,34531, dengan probabilitas F-stat untuk 0000, dapat disimpulkan pada tingkat kepercayaan 99%, variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan uji individu atau tes T-stat dan probabilitas digunakan untuk menguji apakah koefisien regresi parsial berbeda secara individual berhubungan dengan variabel dependen. Perbedaan Model

II dengan Model I terjadi pada variabel utama yaitu variabel pendapatan, dimana variabel pendapatan setelah dikurangi bantuan sesuai dengan teori namun belum berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan .

## **5. KESIMPULAN DAN IMPLIKASIMANAJERIAL**

### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Panel Least Square dengan 26 propinsi selama tahun 1992 sampai 2009, tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dapat disimpulkan : Hasil estimasi model I menunjukkan pendapatan yang memiliki hubungan negatif dan pengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita. Untuk FDI dan variabel DDI, korelasi positif tetapi secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita. Untuk variabel impor dan tenaga kerja, juga tidak sesuai dengan hipotesis dan berpengaruh tidak signifikan. Untuk variabel inflasi dan penduduk, mereka sesuai dengan hipotesis dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita. Untuk variabel pengangguran, adalah sesuai dengan hipotesis tetapi secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita.

Untuk model II (pendapatan kurang oleh hibah), hasil yang diperoleh transform dan sesuai dengan hipotesis tetapi tidak berpengaruh signifikan. Yang berarti bahwa jika pendapatan pemerintah naik, trend pertumbuhan pendapatan per kapita akan meningkat. Dalam model ini membuktikan bahwa setiap daerah harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan sehingga peningkatan pendapatan dan akan mendorong pertumbuhan pendapatan per kapita.

Jika kita bandingkan dengan Oates penelitian sebelumnya (1995) mendeteksi hubungan yang positif signifikan dan kuat antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Phillips dan Woller (1997) menemukan bahwa ada hubungan yang signifikan secara statistik meskipun terbalik antara tingkat pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi dalam sampel negara-negara maju dan gagal untuk menemukan hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi dalam sampel negara-negara kurang berkembang. Sementara itu Hamzah (2004) dengan mengadopsi fungsiproduksi Cobb Douglas, dengan sampel data cross section yang terdiri dari 26 pemerintah negara bagian dan data time series tahunan 1992-2002, menunjukkan bahwa variabel desentralisasi fiskal (indikator pengeluaran) menunjukkan koefisien negatif dan tidak signifikan. Sementara, indikator pendapatan menunjukkan koefisien negatif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

### **5.2. Implikasi Manajerial dan Teoritis**

Berdasarkan penelitian ini, pendapatan daerah belum berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini menunjukkan daerah belum bisa menyerap pendapatan pajak secara optimal dan belum dapat mengalokasikan pendapatannya sehingga belum dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan perkapita bagi masyarakatnya. Sehingga diperlukan kontrol yang kuat dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sendiri sehingga tercapai tujuan kebijakan otonomi daerah. Teori-teori juga telah menyatakan bahwa desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang selanjutnya akan mendorong ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk investasi baik investasi asing dan investasi domestik memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi meskipun hasilnya belum menunjukkan signifikansi statistik. Terkait dengan investasi, kewenangan daerah pada dasarnya sangat besar karena otoritas FDI adalah salah satu kewenangan desentralisasi sesuai dengan PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah provinsi dan kabupaten pemerintah daerah. Untuk investasi dalam negeri diatur oleh UU No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Karena kedua hukum masih relatif baru sehingga belum terlihat pengaruhnya terhadap hasil penelitian ini. Salah satu kendala yang menghambat investasi di

bidang infrastruktur saat ini tidak memadai di banyak daerah, kurangnya kepastian hukum dan jaminan keamanan dan kondisi yang belum persaingan usaha yang sehat dan transparansi dari kebijakan yang belum berjalan dengan baik. Semua pemerintah daerah belum secara optimal melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan hal-hal di atas. Investasi sangat berkaitan erat dengan pekerjaan, di era otonomi daerah, investor pergi ke setiap daerah diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal. Tapi sangat disayangkan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja Indonesia belum selaras atau seimbang, karena angkatan kerja yang tersedia masih memiliki kemampuan akademik dan soft skill yang rendah, sehingga peran pemerintah perlu memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas manusia sumber daya di Indonesia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah salah satu bentuk investasi jangka panjang, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup.

## REFERENCES

- Asatryan, Zareh. 2010. Fiscal Decentralization and Economic Growth in OECD Countries: A Bayesian Model Averaging Approach. Master's Thesis. School of Business and Economics Institute of Public Economics
- Baskaran, T.A. & Feld L.P. 2009. Fiscal Decentralization and Economic Growth in OECD Countries: Is there a Relationship?. *Cesifo Working Paper No. 2721 Category 1: Public Finance July 2009*
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (on-line) Available <http://www.ditjen-otda.depdagri.go.id/> (11 February 2012)
- Feld, L.P. 2009. Fiscal Decentralization and Economic Growth in OECD Countries: Is There a Relationship?. *CESifo Working Paper Series No. 2721.. 2002. Decentralized taxation and the size of government: evidence from Swiss State and Local Governments. Public Finance Group. University Marsburg. German*
- Felterstein, A. & Iwata, S. 2005. Decentralization and Macroeconomic Performance In China; Regional Autonomy has its Costs. *Journal of Economics. Vol. 76. 481 -50.*
- Gujarati, D. 2003. *Basic econometrics. 4<sup>th</sup> Ed.* McGraw-Hill International Editions.
- Hammond, G.W & Tosun, M.S. 2009 The Impact of Local Decentralization on Economic Growth: Evidence from U.S. Counties. Discussion Paper No. 4574 November 2009
- Hamzah, M.Z. 2011. *The Introduction of Fiscal Decentralization.* Third Edition. LPS Sekolah Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia.
- . 2008. *Kajian Teori Desentralisasi Fiskal.* First Edition. LPS Sekolah Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia.
- . 2007. *Fiscal Decentralization and Economic Growth : Evidence of Some Empirical Research.* First Edition. LPS Sekolah Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia.
- . 2004. *The Effect of Fiscal Decentralization to Economic Growth.* Dissertation. Not Published.
- KPPOD News. 2004. *Desentralisasi Ekonomi.* Jakarta Selatan.
- Lai, Yue.Tianzhu, Cheng. 2011. Intergovernmental Allocation of Public Resources, Fiscal Decentralization and Economic Growth. I.J. Information Engineering and Electronic Business, 2011, 3, 8-15 Published Online June 2011 in MECS (<http://www.mecs-press.org/>)
- Laleona, E & Dr, Sonia. 2006. Fiscal decentralization and economic growth. Application to the Autonomous Communities of Common Regime (1997--2001). 267 pages; 3285405.
- Lama, Sangram. 2009. *Decentralized Local Governance: Rhetoric and Practice in Nepal since 1950s.* Unpublished Ph.D Dissertation, Tribhuvan University Kathmandu, Nepal
- Iimi, A. 2004. "Decentralization and Economic Growth Revisited: An Empirical Note" *Journal of Urban Economics, 57: 449 461.*

- Lin, J.Y. & Liu, Z. 2000. Fiscal Decentralization and economic growth in China. *Economic and Cultural Change* 49:1-21.
- Mahmudin. 2009. The Impacts Of Fiscal Decentralization On Local Economic Development In The Cities/Kabupatens Of The Jabodebek Metropolitan Region. Undergraduate Theses from JBPTITBPP/2009-11-02 15:04:54
- Mankiw, N.G., Romer, D. & Weil, D.N. 1992. A contribution to the empirics of economic growth. *Quarterly Journal of Economics* 107: 2.
- Martinez-Vazquez, Jorge and Rider, Mark, 2006, "Fiscal Decentralization and Economic Growth: A Comparative Study of China and India." *Indian Journal of Economics and Business*, 2006, pp. 29-46.
- Nachrowi D Nachrowi. 2006. *Ekonometrika, untuk Analisis Ekonomi*. LPFE UI
- Nguyen, L.P & Anwar, S. 2011. Fiscal decentralisation and economic growth in Vietnam. *Journal of the Asia Pacific Economy*: Vol. 16, No. 1, pp.3-14
- Norris, E.D. 2006. The Challenge of Fiscal Decentralisation in Transition Countries. *Comparative Economic Studies* (2006) 48, 100
- Nota keuangan dan anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun 2010 Republik Indonesia (on-line). Available <http://www.bappenas.go.id> (23 Desember 2011)
- Oates, W. 2008. *Fiscal Federalism*. New York: Harcourt Brace Jovanovich
- Pose, A.R, Ezcurra, Roberto. 2010. Is fiscal decentralization harmful for economic growth? Evidence from the OECD countries. in Economics and Social Sciences working papers series 2010/09.
- Samimi A. Jafari, Potan Lar S.K, Haddad G.K. 2010. Fiscal Decentralization and Economic Growth in Iran. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 4(11): 5490-5495, 2010.
- Shah, A. 2004. Fiscal decentralization in developing and transition economies: progress, problem, and promise. Washington DC: World Bank Working Paper.
- Silvestre J.L. Carrion, Espas Marta, Mora Toni. 2008. Fiscal Decentralization and Economic Growth in Spain. *Public Finance Review* March 2008 vol. 36 no. 2 194-218.
- Simanjuntak, R. A. 2002. *Berbagai isu penerimaan daerah di era desentralisasi*. Makalah Lokakarya Kebijakan Fiskal Untuk Pembangunan Daerah dalam Era Desentralisasi, Medan, May 14 16.
- Tanzi, V. 2008. "The Future of Fiscal Federalism," *European Journal of Political Economy*, 24: 705-712.
- \_\_\_\_\_. 1996. Fiscal Federalism and decentralization: a review of some efficiency and macroeconomic aspects. In Michael Bruno & Boris Pleskovic (eds). *Annual World Bank Conference on Development Economics 1995*. Washington DC: World Bank.
- The law no.5/1979: Local Government
- The law no.21/1999: Local Government (replacement Law No.5/1979)
- The law no.25/1999: Central-Local Balance Budget
- The law no.32/2004: Local Government (replacement Law No.21/1999)
- The law no.33/2004: Central-Local Balance Budget ((replacement Law No.25/1999)
- The law no.28/2009: Local Tax and Redistribution
- Thornton, John. 2007. Fiscal Decentralization and Economic Growth Reconsidered. *Journal of Urban Economic* 61 page 64-70
- Tirtosuharto, D. 2010. The Impact of Fiscal Decentralization and State Allocative Efficiency On Regional Growth In Indonesia. Issue: 2 Pp.287-307 Doi:10.1142/S1793993310000160
- Todaro, M.P. 1994. *Pembangunan ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Uchimura, H. & Jutting, J. 2007. Fiscal Decentralization, Chinese Style: Good for Health Outcomes?. OECD Development Centre Working Paper No. 264.
- Vazquez, J.M, Rider M. 2006. Fiscal Decentralization and Economic Growth : A Comparative Study of China and India. *Indian Journal of Economics & Bussiness*, Apecial Issue China & India.

- Vanquez, J.M & McNab, R.M. 2006. Fiscal decentralization, macrostability, and growth. *Hacienda Pública Española/ Revista de Economía Pública*, 179-(4/2006): 25-49
- Vo, D.H. 2006. Fiscal Decentralisation Index: The International Comparison. economics Program, UWA Business School The University of Western Australia
- Yakita, Sayaka. 2006. Fiscal Decentralization, Migration, and Growth. *School of Economics. Nagoya University. Furo cho Chikusaku. Nagoya 464-8601. Japan.*
- Yamoah, A.B. 2007. The Effects Of Fiscal Decentralization On Economic Growth In U.S. Counties. Dissertation. Publised.
- Zhao Y.Liang. 2011. Management Science and Engineering (ICMSE), 2011 International Conference on. 13-15 Sept. 2011 page: 1232 1237.